

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 32 TAHUN 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2027

--	--	--



PEMERINTAH KOTA BATAM INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA

TAHUN
2027



@Inspektoratbatam



www.Inspektorat.batam.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027.

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, Juli 2026
Plt. Inspektur Daerah Kota Batam



Drs. Yusfa Hendri, M.Si
NIP. 19690913 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU dan IKK Tahun 2025	7
2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025	10
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	11
2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..	11
2.3.2 Permasalahan	20
2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis	21
2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD	22
2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.....	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	23
3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	28
4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 ...	28
4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan	43
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	48
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	48
BAB VI PENUTUP	49
6.1 Catatan Penting	49
6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	49
6.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025....	10
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025.....	10
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 ..	10
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (tahun berjalan/tahun n-1) Kota Batam.....	13
Tabel 2.5	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	22
Tabel 2.6	Inovasi Bidang Urusan Dalam Upaya Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	22
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2027	26
Tabel 3.2	Keselaran Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027	27
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiran Maju Tahun 2028 Kota Batam.....	27
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027.....	30
Tabel 4.2	Dukungan Program Inspektorat Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2027	44
Tabel 4.3	Dukungan Program Inspektorat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027	44
Tabel 4.4	Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Presiden Republik Indonesia.....	45
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Darah Kota Batam.....	48
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Darah Kota Batam.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD	2
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan urusan pemerintahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

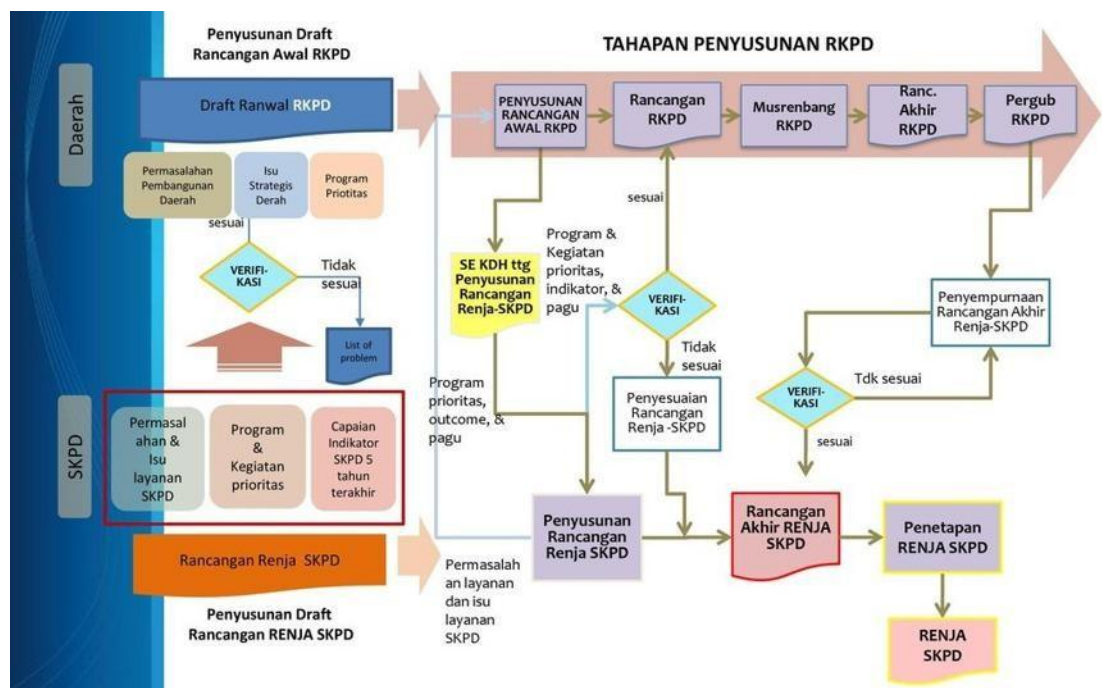
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

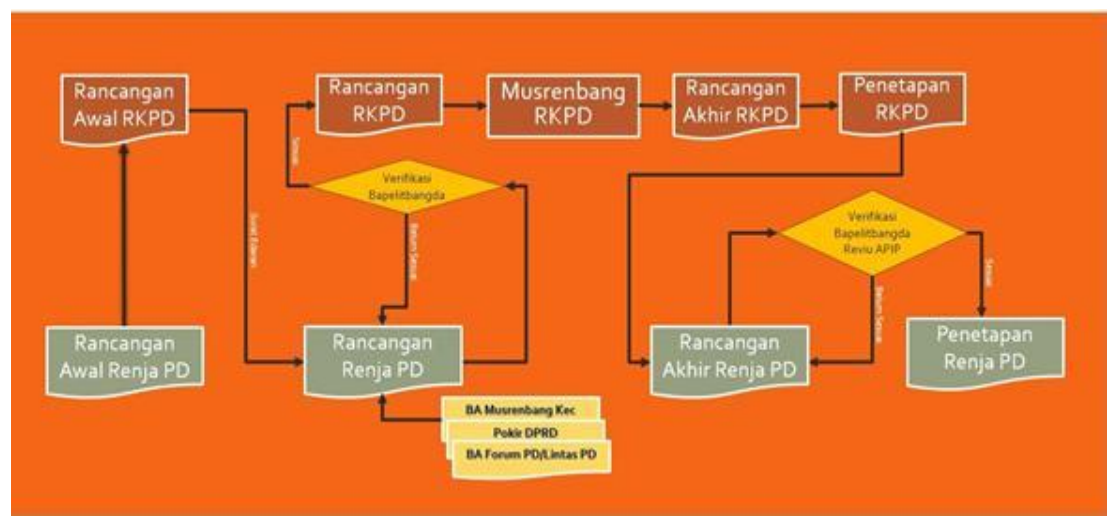
- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja

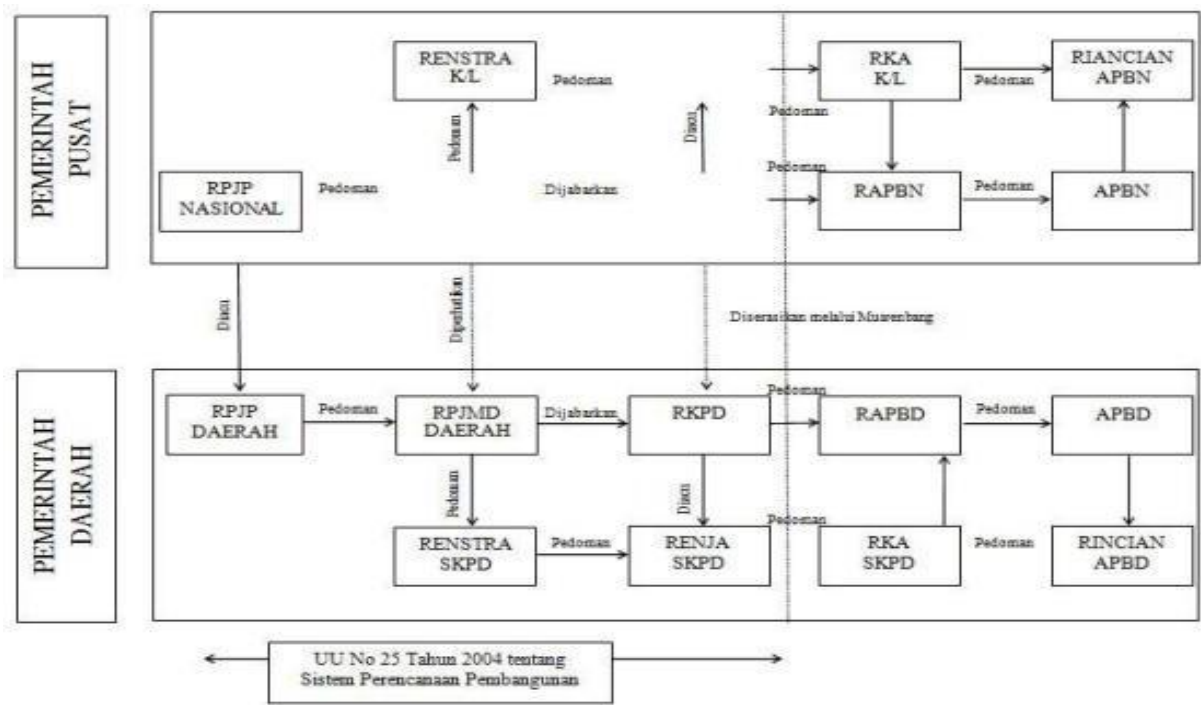


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau:4,18/2025);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1625);
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1718).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja Perangkat Daerah.
2. Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 serta disusun sesuai dengan kaidah produk hukum.
3. Maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.
4. Sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas masing-masing bab dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menjelaskan gambaran bidang urusan yang meliputi:

1. Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait).
3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis.
4. Telaah pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan:

1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029).
2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan:

1. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan.
2. Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap

pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

SPIP Terintegrasi merupakan pengembangan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Dalam pendekatan baru BPKP, penilaian SPIP tidak lagi hanya melihat keberadaan unsur pengendalian intern, tetapi mengintegrasikan empat perspektif utama yaitu:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)
3. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Keempat komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan paradigma baru tersebut, penurunan ke Level 2 umumnya bukan karena pemerintah daerah tidak memiliki sistem, tetapi karena sistem tersebut belum terintegrasi, belum dijalankan secara konsisten, dan belum terbukti efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta pencegahan korupsi. Ini sejalan dengan arah pembinaan BPKP yang menggeser fokus dari kelengkapan administrasi menuju efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan integritas.

Penurunan level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Batam disebabkan oleh perubahan fokus penilaian dari administratif (pemenuhan dokumen) menjadi penilaian implementasi dan efektivitas di lapangan. Penilaian SPIP kini menuntut bukti konkret atas pengendalian risiko dan ketaatan yang benar-benar berdampak. Alasan utama yang membuat nilai dan level SPIP banyak mengalami penurunan antara lain:

- a. Peralihan ke SPIP Terintegrasi. Penilaian tidak hanya melihat dokumen kebijakan di atas kertas, tetapi juga menuntut integrasi dengan Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

- b. Pembuktian Implementasi Lapangan. Banyak instansi yang nilainya turun karena praktik sehari-hari di lapangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat.
- c. Fokus pada Keberjalanan Substansi. Penilaian baru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengecekan silang (*cross check*) untuk memastikan pengendalian intern bukan sekadar formalitas administratif untuk memenuhi regulasi.
- d. Evaluasi Lintas Sektor. Adanya integrasi pengukuran tata kelola, seperti *MCP (Monitoring Centre for Prevention)* KPK, yang menuntut perbaikan sistem nyata untuk mencegah risiko korupsi.

Faktor dominan yang menyebabkan penurunan ke Level 2 adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen risiko belum terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan.
- b. Pengendalian intern belum efektif, meskipun dokumen telah tersedia.
- c. Pencegahan korupsi belum berbasis risiko, sehingga IEPK rendah.
- d. Penilaian berbasis bukti implementasi menunjukkan bahwa pengendalian belum berjalan secara konsisten.
- e. Budaya risiko dan budaya pengendalian belum terbentuk di seluruh perangkat daerah.
- f. Monitoring dan evaluasi belum menghasilkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam paradigma baru BPKP, penilaian SPIP Terintegrasi tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi menggunakan pendekatan integratif. Artinya, kelemahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya sehingga berdampak pada penurunan nilai maturitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah yang sebelumnya berada pada Level 3 (Terdefinisi) atau lebih tinggi, namun setelah evaluasi dengan metode baru mengalami penurunan menjadi Level 2 (Berkembang), perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Filosofi Penilaian

Pada metode lama, penilaian lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen (*compliance based*), seperti:

- tersedianya kebijakan SPIP;
- register risiko;
- SOP;
- pedoman pengawasan;
- program kerja pengawasan.

Dalam paradigma baru, BPKP menilai efektivitas implementasi (*performance based*), yaitu apakah seluruh instrumen tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Meskipun memiliki dokumen yang lengkap, tetapi belum dapat menunjukkan bukti bahwa dokumen tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan.

2. Integrasi Maturitas SPIP dengan MRI

Pada paradigma baru, unsur Penilaian Risiko dalam SPIP tidak lagi cukup dibuktikan dengan keberadaan register risiko.

BPKP menilai apakah:

- risiko berasal dari sasaran strategis bukan menyusun register risiko hanya untuk memenuhi kewajiban;
 - risiko telah dianalisis;
 - mitigasi dijalankan;
 - risiko menjadi dasar penyusunan program dan menghubungkan risiko dengan RKPD, Renstra maupun Renja;
 - pimpinan menggunakan informasi risiko dalam pengambilan keputusan.
3. Integrasi SPIP dengan IEPK
- Paradigma baru menganggap bahwa pengendalian intern harus mampu mencegah korupsi. Karena itu BPKP mengintegrasikan:
- SPIP
 - *Fraud Control*
 - Manajemen Risiko Korupsi
 - Sistem Integritas
- Penyebab penurunan karena masih banyak perangkat daerah yang:
- belum memiliki peta risiko korupsi;
 - belum mengidentifikasi area rawan *fraud*;
 - belum melakukan mitigasi benturan kepentingan;
 - belum mengukur efektivitas pengendalian gratifikasi;
 - memiliki *Whistleblowing System* yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
- Kondisi tersebut menyebabkan IEPK rendah, sehingga menurunkan nilai SPIP Terintegrasi secara keseluruhan.
4. Integrasi SPIP dengan Kapabilitas APIP
- Pada paradigma baru, keberhasilan SPIP sangat dipengaruhi oleh kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi:
- *assurance*;
 - *consulting*;
 - *quality assurance*;
 - *early warning*.
5. Integrasi Bukti Implementasi (*Evidence-Based Assessment*)
- Perubahan terbesar adalah penilaian berbasis bukti implementasi. Sebelumnya cukup menunjukkan SOP, kebijakan, SK dan Register Risiko. Kini BPKP meminta bukti bahwa seluruh dokumen tersebut benar-benar digunakan, misalnya:
- notulen rapat yang membahas risiko;
 - perubahan program berdasarkan hasil analisis risiko;
 - laporan monitoring mitigasi;
 - tindak lanjut rekomendasi APIP;
 - evaluasi efektivitas pengendalian.
- Jika bukti implementasi tidak tersedia, maka indikator dianggap belum terpenuhi, meskipun dokumen administratif lengkap.
6. Integrasi Budaya Risiko
- Paradigma baru juga menilai budaya organisasi. Indikatornya antara lain:
- komitmen pimpinan;
 - keterlibatan seluruh pegawai;
 - komunikasi risiko;
 - budaya pengendalian.
7. Integrasi Monitoring dan Evaluasi
- BPKP menilai apakah organisasi melakukan:

- monitoring risiko;
- monitoring pengendalian;
- evaluasi berkala;
- perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Jika organisasi hanya menyusun dokumen di awal tahun tanpa pemantauan dan perbaikan secara berkala, maka sistem dianggap belum matang.

Apabila salah satu komponen dari MRI atau IEPK yang lemah, maka efektivitas SPIP secara keseluruhan ikut menurun. Karena penilaian dilakukan secara terintegrasi, kelemahan pada satu aspek akan memengaruhi tingkat maturitas SPIP dan dapat menyebabkan organisasi hanya memenuhi karakteristik Level 2.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKU Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	Level 3 (3,290)	Level 3 (3,301)	Level 2 (2,643)	80,07		Level 3 (3,352)
2.	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,160)	Level 3 (3,000)	Level 2 (2,370)	79,00		Level 3 (3,200)
3.	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	3,216	3,219	2,498	77,60%		3,247
4.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	3,144	3,149	2,748	87,27%		3,165
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat Daerah	Nilai	90,00	91,37	91,58	100		92,57

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja (%)	Status Kinerja RKPD 2025	Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)

Nihil

2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Tabel 2.3 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Satuan	Realisasi		
			2023	2024	2025

		Nihil			
--	--	-------	--	--	--

2.3 Rumusan Permasalahan Dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.2 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 93,18%.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 79,17%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 91,67%.
 - c) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dari terget fisik 100% mencapai realisasi 100%.
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - b) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan, dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
 - a) Kegiatan Asistensi dan Pendampingan dari target fisik yaitu 100% mencapai 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;
Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah karena adanya perubahan jadwal kalender pada penyelenggara diklat yaitu BPKP.
5. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan karena pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal, adanya perencanaan yang matang, dukungan sumber daya, kepemimpinan yang kuat, serta sistem pengendalian yang efektif.
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
Dengan tidak tercapainya target kegiatan yang dimaksud tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
(tahun berjalan/tahun n-1) Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah									
	Bidang Urusan: Inspektorat Daerah									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	94,5		92,50	92,57	100%	93,50		
		Nilai SAKIP PD	78,97		75.33	75,33	100%	76,89		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	NA	NA	NA	NA	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	NA	NA	NA	NA	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/Bulan		88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	100%	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Laporan	4 Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%		100%	93,18%	93,18%	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96 Orang		88 Orang	82 Orang	93,18%	90 orang	30 orang	33,33%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%		100%	91,67%	91,67%	100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	0 Paket	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	1 Paket	25%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 Laporan	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%		100%	0	98,95%	100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	0 Unit		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	50 Unit	0 paket	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		127 Unit	123 Unit	96,85%	50 Unit	0 unit	0%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 laporan	0%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 laporan	0%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%		100%	79,17%	79,17%	100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		8 Unit	3 Unit	37,50%	8 Unit	7 Unit	75%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		73 Unit	73 Unit		30 Unit	0 Unit	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100%		100%	100%	100%	100%		
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100%		100%	100%	100%	100%		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%		100%	98,89%	98,89%	100%		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	15 Laporan		15 Laporan	14 Laporan	93,33%	15 Laporan	3 Laporan	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemerintah Daerah								
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	4 Laporan	30%
	Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	100%	20 Laporan	0 Laporan	0%
	Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%	1 Kesepakatan	0 Kesepakatan	0%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1	100%		100%	100%	100%	100%		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen	100%		100%	100%	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Asistensi	Risiko								
		Persentase pemenuhan pilar IEPK	100%		100%	100%	100%	100%		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%		100%	100%	100%	100%		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%		100%	100%	100%	100%		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah		45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100%	45 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	0%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	9 Perangkat Daerah		45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100%	45 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Birokrasi								
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	0 kegiatan	0%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	17 Perangkat Daerah		17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100%	17 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%

2.3.2 Permasalahan

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 agar fungsi pengawasan mampu memberikan nilai tambah (*adding value*) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya penambahan sumber daya manusia (SDM);
2. Sistem aplikasi pendukung pengawasan (e-audit, aplikasi manajemen risiko, aplikasi tindak lanjut) belum terintegrasi optimal;
3. Perlu adanya penambahan peralatan kerja teknis;
4. Fasilitas operasional dan penunjang kelancaran pemeriksaan belum sepenuhnya memadai;
5. Penugasan Tim Pembinaan dan Pengawasan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kompetensinya;
6. Belum adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
7. Jangka waktu pelaksanaan dan pembinaan pengawasan yang belum terstandarkan secara rinci.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (LHP);
2. Adanya revisi regulasi yang cepat terkait keuangan daerah, PBJ, dan tata kelola yang menyebabkan penyesuaian berulang;
3. Adanya proyek strategis yang semakin kompleks sehingga menuntut kemampuan audit yang lebih maju;
4. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah;
5. Perlunya mitigasi yang ketat terhadap Risiko Kecurangan (*fraud risk*) pada perangkat daerah;
6. Adanya mandat pelaksanaan tugas dari instansi vertikal yang banyak dan wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam;
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perangkat daerah;
8. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah;
9. Perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan pada perangkat daerah.

2.3.3 Kondisi Lingkungan Dinamis

Selain mengacu pada dokumen perencanaan, penyusunan Renja Tahun 2027 juga mempertimbangkan berbagai perkembangan lingkungan strategis yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah, antara lain:

- a. Percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- b. Perubahan regulasi nasional di bidang pengawasan, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, serta reformasi birokrasi.
- c. Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
- d. Penguatan kebijakan nasional mengenai manajemen risiko, SPIP, pencegahan korupsi, dan peningkatan kapabilitas APIP.
- e. Dinamika fiskal daerah yang menuntut pelaksanaan program secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
- f. Peningkatan investasi dan pembangunan strategis di Kota Batam yang memerlukan pengawasan intern yang adaptif dan berbasis risiko.

Untuk pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya kerjasama/kolaborasi antara Inspektorat Daerah dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Batam dalam melaksanakan pengawasan internal;
- b. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *consulting*, *quality assurance* and *early warning system*;
- c. dinamika kebijakan pemerintah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Peraturan dan kebijakan pemerintah terkait penguatan peran Inspektorat;
- b. Kuatnya komitmen pimpinan atas kapabilitas APIP dalam implementasi pengawasan intern;
- c. Kuatnya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB;
- d. Kuatnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja;
- e. Adanya mandatori regulasi yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga;
- f. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan, isu strategis, serta dinamika lingkungan tersebut, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, adaptif, dan berintegritas, sekaligus mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2027.

2.4 Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Pokir DPRD (Pokok-Pokok Pikiran DPRD) adalah usulan program atau kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat yang dijamin oleh anggota dewan melalui masa reses atau kunjungan lapangan, lalu diperjuangkan untuk masuk ke dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah yang membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan investigasi.

Inspektorat daerah tidak memiliki usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Usulan Pokir adalah hak dan kewenangan murni dari anggota legislatif (DPRD) yang dijamin melalui masa reses untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya, Inspektorat memiliki fungsi krusial sebagai pengawas internal dalam siklus Pokir DPRD tersebut. Peran Inspektorat Daerah dalam Pokir meliputi:

- a. Probit Audit
Melakukan pengawasan dan audit menyeluruh mulai dari tahap perencanaan agar Pokir bebas dari konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan anggaran.
- b. Pengawasan Pelaksanaan
Memastikan program/kegiatan yang dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan usulan Pokir dan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.5. Pokok-pokok Pikiran DPRD

No.	Pengusul	Usulan	Uraian Pekerjaan	Alamat Lokasi	Status	Volume	Satuan	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Opd Tujuan Akhir
					Nihil					

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Inovasi urusan dalam bidang pelayanan masyarakat bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Transformasi ini bergeser dari sistem manual ke arah digitalisasi yang efisien, memotong birokrasi, dan mendekatkan pemerintah langsung kepada kebutuhan warga setempat. Inspektorat Daerah kota batam belum memilki inovasi urusan dalam bidang pelayanan masyarakat.

Tabel 2.6. Inovasi Bidang Urusan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat

Prioritas Pembangunan	Urusan Pemerintahan	Inovasi	Jenis	Permasalahan	Manfaat	Outcome	Indikator yang Didukung
			Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah adalah "Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah."

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029. Adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya kapabilitas APIP, dengan indikator :

a. Nilai Kapabilitas APIP.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan Pengendalian Korupsi, dengan indikator :

a. Indeks Manajemen Risiko.

b. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi.

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan, dengan indikator:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat.

SPIP Terintegrasi merupakan pengembangan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Dalam pendekatan baru BPKP, penilaian SPIP tidak lagi hanya melihat keberadaan unsur pengendalian intern, tetapi mengintegrasikan empat perspektif utama yaitu:

1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP

2. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

3. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Keempat komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan paradigma baru tersebut, penurunan ke Level 2 umumnya bukan karena pemerintah daerah tidak memiliki sistem, tetapi karena sistem tersebut belum terintegrasi, belum dijalankan secara konsisten, dan belum terbukti efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta pencegahan korupsi. Ini sejalan dengan arah pembinaan BPKP yang menggeser fokus dari kelengkapan administrasi menuju efektivitas tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan integritas.

Penurunan level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah Kota Batam disebabkan oleh perubahan fokus penilaian dari administratif (pemenuhan dokumen) menjadi penilaian implementasi dan efektivitas di lapangan. Penilaian SPIP kini menuntut bukti konkret atas pengendalian risiko dan ketaatan yang benar-benar berdampak. Alasan utama yang membuat nilai dan level SPIP banyak mengalami penurunan antara lain:

- a. Peralihan ke SPIP Terintegrasi. Penilaian tidak hanya melihat dokumen kebijakan di atas kertas, tetapi juga menuntut integrasi dengan Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
- b. Pembuktian Implementasi Lapangan. Banyak instansi yang nilainya turun karena praktik sehari-hari di lapangan tidak berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat.
- c. Fokus pada Keberjalanan Substansi. Penilaian baru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengecekan silang (*cross check*) untuk memastikan pengendalian intern bukan sekadar formalitas administratif untuk memenuhi regulasi.
- d. Evaluasi Lintas Sektor. Adanya integrasi pengukuran tata kelola, seperti MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) KPK, yang menuntut perbaikan sistem nyata untuk mencegah risiko korupsi.

Faktor dominan yang menyebabkan penurunan ke Level 2 adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen risiko belum terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan.
- b. Pengendalian intern belum efektif, meskipun dokumen telah tersedia.
- c. Pencegahan korupsi belum berbasis risiko, sehingga IEPK rendah.
- d. Penilaian berbasis bukti implementasi menunjukkan bahwa pengendalian belum berjalan secara konsisten.
- e. Budaya risiko dan budaya pengendalian belum terbentuk di seluruh perangkat daerah.
- f. Monitoring dan evaluasi belum menghasilkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam paradigma baru BPKP, penilaian SPIP Terintegrasi tidak lagi dilakukan secara parsial, tetapi menggunakan pendekatan integratif. Artinya, kelemahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya sehingga berdampak pada penurunan nilai maturitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah yang sebelumnya berada pada Level 3 (Terdefinisi) atau lebih tinggi, namun setelah evaluasi dengan metode baru mengalami penurunan menjadi Level 2 (Berkembang), perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Filosofi Penilaian

Pada metode lama, penilaian lebih berorientasi pada kelengkapan dokumen (*compliance based*), seperti:

- tersedianya kebijakan SPIP;
- register risiko;
- SOP;
- pedoman pengawasan;
- program kerja pengawasan.

Dalam paradigma baru, BPKP menilai efektivitas implementasi (*performance based*), yaitu apakah seluruh instrumen tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Meskipun memiliki dokumen yang lengkap, tetapi belum dapat menunjukkan bukti bahwa dokumen tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan.

2. Integrasi Maturitas SPIP dengan MRI

Pada paradigma baru, unsur Penilaian Risiko dalam SPIP tidak lagi cukup dibuktikan dengan keberadaan register risiko.

BPKP menilai apakah:

- risiko berasal dari sasaran strategis bukan menyusun register risiko hanya untuk memenuhi kewajiban;
- risiko telah dianalisis;
- mitigasi dijalankan;
- risiko menjadi dasar penyusunan program dan menghubungkan risiko dengan RKPD, Renstra maupun Renja;
- pimpinan menggunakan informasi risiko dalam pengambilan keputusan.

3. Integrasi SPIP dengan IEPK

Paradigma baru menganggap bahwa pengendalian intern harus mampu mencegah korupsi. Karena itu BPKP mengintegrasikan:

- SPIP
- *Fraud Control*
- Manajemen Risiko Korupsi
- Sistem Integritas

Penyebab penurunan karena masih banyak perangkat daerah yang:

- belum memiliki peta risiko korupsi;
- belum mengidentifikasi area rawan *fraud*;
- belum melakukan mitigasi benturan kepentingan;
- belum mengukur efektivitas pengendalian gratifikasi;
- memiliki *Whistleblowing System* yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan IEPK rendah, sehingga menurunkan nilai SPIP Terintegrasi secara keseluruhan.

4. Integrasi SPIP dengan Kapabilitas APIP

Pada paradigma baru, keberhasilan SPIP sangat dipengaruhi oleh kemampuan APIP dalam menjalankan fungsi:

- *assurance*;
- *consulting*;
- *quality assurance*;
- *early warning*.

5. Integrasi Bukti Implementasi (*Evidence-Based Assessment*)

Perubahan terbesar adalah penilaian berbasis bukti implementasi. Sebelumnya cukup menunjukkan SOP, kebijakan, SK dan Register Risiko. Kini BPKP meminta bukti bahwa seluruh dokumen tersebut benar-benar digunakan, misalnya:

- notulen rapat yang membahas risiko;
- perubahan program berdasarkan hasil analisis risiko;
- laporan monitoring mitigasi;
- tindak lanjut rekomendasi APIP;
- evaluasi efektivitas pengendalian.

Jika bukti implementasi tidak tersedia, maka indikator dianggap belum terpenuhi, meskipun dokumen administratif lengkap.

6. Integrasi Budaya Risiko

Paradigma baru juga menilai budaya organisasi.

Indikatornya antara lain:

- komitmen pimpinan;
- keterlibatan seluruh pegawai;
- komunikasi risiko;
- budaya pengendalian.

7. Integrasi Monitoring dan Evaluasi
 BPKP menilai apakah organisasi melakukan:

- monitoring risiko;
- monitoring pengendalian;
- evaluasi berkala;
- perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Jika organisasi hanya menyusun dokumen di awal tahun tanpa pemantauan dan perbaikan secara berkala, maka sistem dianggap belum matang.

Apabila salah satu komponen dari MRI atau IEPK yang lemah, maka efektivitas SPIP secara keseluruhan ikut menurun. Karena penilaian dilakukan secara terintegrasi, kelemahan pada satu aspek akan memengaruhi tingkat maturitas SPIP dan dapat menyebabkan organisasi hanya memenuhi karakteristik Level 2.

Oleh karena itu, perlunya langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi kelemahan tersebut agar penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dapat berjalan optimal dan mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Tahun 2027

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2027
1.	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level 3 (3,323)
2.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3 (3,100)
3.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penegakan Integritas dan pengendalian korupsi	Indeks Manajemen Risiko	3,324
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,158
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat	91,97

3.2 Arah Kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat penerapan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah.
2. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui peningkatan kompetensi auditor, audit berbasis risiko, dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Mengoptimalkan pengawasan atas program prioritas dan proyek

- strategis daerah.
- 4. Memperkuat pencegahan korupsi melalui pengawasan, pendampingan, dan pengendalian gratifikasi serta benturan kepentingan.
 - 5. Meningkatkan kualitas pengawasan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan daerah.
 - 6. Mempercepat penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP maupun pemeriksa eksternal.
 - 7. Mengembangkan pengawasan berbasis data (*continuous auditing dan data analytics*) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Tabel 3.2 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kepulauan Riau, Prioritas Kota Batam dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Batam	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan	Reformasi birokrasi, pelayanan publik bermutu, dan pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan efektivitas pengawasan intern berbasis risiko, memperkuat SPIP, manajemen risiko, dan kapabilitas APIP menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Penguatan akuntabilitas keuangan negara/daerah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas reviu perencanaan dan penganggaran, reviu LKPD, pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Kota Batam pada perencanaan Tahun 2027 merupakan tahun ke-5 dalam Renstra Tahun 2025 – 2029. Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi, Inspektorat Daerah Kota Batam untuk Tahun 2027 melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua) jenis sub kegiatan.

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2027 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 yaitu Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2027 Inspektorat Daerah mengusulkan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan, 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 41.707.824.107 (empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh rupiah). Adapun program dan kegiatan yang disusulkan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah .
 - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.
 - 4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan.
 - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
 - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
 - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas.
 - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.
 2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel. 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab
									Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
													Nasional	Provinsi	Daerah					
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			41.707.824.107									51.693.472.200		
6	01					INSPEKTORAT DAERAH			41.707.824.107									51.693.472.200		
						INSPEKTORAT DAERAH			41.707.824.107									51.693.472.200		
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD	84,65	78,97 Nilai	39.630.921.407							81,7	48.117.922.200	Inspektorat Daerah	
							Indeks Pelayanan Keseekretariatan PD	96,5	94,50 Nilai								95,5		Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu		100 Persentase	8.081.100							100	60.500.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5.268.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pegawai Inspektorat Daerah Kota Batam	2	35.500.000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	2.813.100	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	3	25.000.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan		100 Persentase	35.212.210.707							100	41.378.645.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		96 Orang/bulan	35.159.170.707	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	118	41.300.000.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	53.040.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	12	78.645.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		100 Persentase	2.497.441.000							100	3.268.627.200	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		96 Orang	2.497.441.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	118	3.268.627.200	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran		100 Persentase	1.045.908.400							100	2.088.600.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	20.366.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	1	80.000.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	238.134.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan	Pegawai Inspektorat Kota Batam	5	423.500.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			yang berkelanjutan dan adil				
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	78.229.400	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	4	102.850.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	35.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	1	30.250.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	674.179.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	12	1.452.000.000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
												Nasional	Provinsi			Daerah			
												dan Penyelundupan							
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan		100 Persentase	474.501.000							100	350.000.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	0	0	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15 Unit	66.754.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	20	200.000.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	407.747.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	20	150.000.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												dan Penyelundupan							
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan		100 Persentase	69.099.200							100	84.700.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	33.099.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	12	36.300.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	36.000.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	12	48.400.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik		100 Persentase	323.680.000							100	886.850.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	44.640.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan	Pegawai Inspektorat Kota Batam	1	72.600.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi						Daerah	
												serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			yang berkelanjutan dan adil					
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	243.730.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	11	453.750.000	Inspektorat Daerah	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40 Unit	28.600.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	-Prioritas Provinsi 1. Pengembangan potensi Ekonomi, maritim, dan investasi yang berkualitas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan			-Prioritas Kota Batam 1. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial adaptif integratif	Pegawai Inspektorat Kota Batam	40	60.500.000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11 Unit	6.710.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Pegawai Inspektorat Kota Batam	1	150.000.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Pegawai Inspektorat Kota Batam	1	150.000.000	Inspektorat Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	100	100 Persentase	1.096.061.900								100	1.554.850.000	Inspektorat Daerah
						Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	100	100 Persentase									100		Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100 Persentase	999.524.000								100	1.270.500.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		6 Laporan	422.105.900	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	15	302.500.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Laporan	7.280.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	1	181.500.000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			berkelanjutan dan adil				
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		19 Laporan	44.393.500	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		20	145.200.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1 Laporan	2.929.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		2	181.500.000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	521.644.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1	363.000.000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												dan Penyelundupan							
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	1.171.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		2	96.800.000	Inspektorat Daerah	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1		100 Persentase	96.537.900							100	284.350.000	Inspektorat Daerah	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 Laporan	36.805.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1	102.850.000	Inspektorat Daerah	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		1 Laporan	59.732.900	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi,		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		1	181.500.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
												Nasional	Provinsi						Daerah
												dan Penyelundupan							
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan komponen dan area Indeks Manajemen Risiko	100	100 Persentase	980.840.800							100	2.020.700.000	Inspektorat Daerah	
						Persentase pemenuhan pilar IEPK	100	100 Persentase								100		Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan		100 Persentase	6.631.600							100	145.200.000	Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	3.934.600	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	1	60.500.000	Inspektorat Daerah	
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	2.697.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil	Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	1	84.700.000	Inspektorat Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi						Daerah	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi		100 Persen	974.209.200							100	1.875.500.000	Inspektorat Daerah		
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		45 perangkat daerah	198.065.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	45	423.500.000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		9 perangkat daerah	544.250.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	45	363.000.000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	119.055.000	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	2	907.500.000	Inspektorat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Dukungan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
								Target 2027	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif			
												Nasional	Provinsi						Daerah	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		17 perangkat daerah	112.839.200	Kota Batam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-Prioritas Nasional 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		-Prioritas Kota Batam 3. Penguatan inklusi sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil		Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemko Batam	17	181.500.000	Inspektorat Daerah	
TOTAL:									41.707.824.107										51.693.472.200	

4.2 Rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), dan tematik lainnya sesuai bidang urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, Inspektorat Daerah mengarahkan pendanaan pada pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas, pengendalian intern, serta pencegahan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dukungan pendanaan tersebut diwujudkan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, yang menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan intern, memperkuat sistem pengendalian, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan, pendanaan diprioritaskan untuk pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilaksanakan secara berbasis risiko (*Risk Based Audit*) dengan fokus pada pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program prioritas pemerintah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendeteksi secara dini potensi penyimpangan, memperkuat pengendalian intern, meningkatkan kepatuhan perangkat daerah, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Sementara itu, melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi, pendanaan diarahkan pada penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan melalui penyusunan kebijakan pengawasan, pembinaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan manajemen risiko, evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pembangunan Zona Integritas, pendampingan program MCP (*Monitoring Center for Prevention*) yang di perbarui menjadi MCSP (*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention*), pembinaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), implementasi Whistleblowing System (WBS), serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Program ini juga mendukung pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan melalui digitalisasi proses audit, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengembangan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi.

Melalui dukungan pendanaan pada kedua program tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan intern, memperkuat kapabilitas APIP, meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meningkatkan Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, mempercepat reformasi birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan

berintegritas sebagai kontribusi nyata terhadap pencapaian Prioritas Nasional 7.

Tabel 4.2 Dukungan Program Inspektorat Daerah terhadap Prioritas Nasional Tahun 2027

Prioritas Nasional	Dukungan Program Inspektorat Daerah	Anggaran
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	1.096.061.900,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	980.840.800,00

Sebagai bagian dari pembangunan karakter birokrasi yang berlandaskan nilai-nilai lokal, Inspektorat Daerah mendukung pelestarian budaya melayu melalui penguatan budaya kerja aparatur yang mengedepankan nilai-nilai integritas, amanah, santun, musyawarah, tanggung jawab, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pengawasan maupun pelayanan kepada pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam pembinaan aparatur, pembangunan budaya organisasi, serta implementasi etika pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Melalui dukungan pendanaan pada kedua program tersebut, Inspektorat Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, percepatan reformasi birokrasi yang berdampak, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai budaya melayu sebagai identitas Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.3 Dukungan Program Inspektorat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Provinsi	Dukungan Program Inspektorat Daerah	Anggaran
Prioritas 3 Pengembangan Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Perluasan Pemanfaatan Teknologi Informasi, serta Pelestarian Budaya Melayu.	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	1.096.061.900,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	980.840.800,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.630.921.407,00

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Presiden di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Inspektorat Daerah mengarahkan kebijakan pendanaan pada penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah melalui peningkatan efektivitas pengendalian intern, pengawasan berbasis risiko, pembinaan tata kelola pemerintahan, serta penguatan budaya integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, Inspektorat Daerah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan integritas, edukasi antikorupsi, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta pengawalan implementasi kebijakan pencegahan korupsi pada seluruh perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, praktik perjudian, dan penyelundupan melalui pengawasan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan ketertiban umum, serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan.

Inspektorat Daerah terus memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Penegak Hukum (APH), serta seluruh perangkat daerah dalam rangka mengawal implementasi kebijakan pencegahan korupsi, mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah daerah.

Melalui dukungan pendanaan pada program tersebut diharapkan terwujud peningkatan Kapabilitas APIP, meningkatnya maturitas SPIP dan Manajemen Risiko, meningkatnya Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta terbangunnya budaya integritas yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Tabel 4.4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi
Presiden Republik Indonesia

Program Prioritas Presiden	Dukungan Program Inspektorat Daerah	Anggaran
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan.	1.096.061.900,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	980.840.800,00

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, Inspektorat Daerah Kota Batam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah.

Penetapan IKU Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pengawasan intern yang mampu memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pengendalian intern, peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah tidak hanya berperan sebagai pemeriksa kepatuhan (*compliance audit*), tetapi telah berkembang menjadi mitra strategis kepala daerah (*strategic partner*) melalui kegiatan assurance dan consulting yang memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan IKU Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP, penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, peningkatan kualitas manajemen risiko pemerintah daerah, serta penguatan integritas dan budaya antikorupsi pada perangkat daerah.

Dalam pencapaiannya, IKU Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 mengukur beberapa aspek utama, antara lain:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
Indikator ini menggambarkan kemampuan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit*) yang menghasilkan rekomendasi berkualitas dan memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola perangkat daerah.
Pengawasan tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan, tetapi lebih menekankan pada kualitas hasil pengawasan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Indikator kapabilitas APIP menggambarkan tingkat kematangan organisasi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan intern sesuai standar profesional.
Peningkatan kapabilitas APIP Tahun 2027 diarahkan pada penguatan:
 - a. independensi dan objektivitas APIP;
 - b. kompetensi auditor dan pejabat pengawas;
 - c. penerapan standar audit intern pemerintah;

- d. pengembangan layanan konsultasi pengawasan;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan.

Melalui peningkatan kapabilitas tersebut, Inspektorat diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) serta rekomendasi strategis bagi pimpinan daerah.

3. Meningkatnya Penerapan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Batam.

Indikator ini mengukur tingkat efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah yang mencakup integrasi antara:

- a. Lingkungan Pengendalian
Mengukur komitmen pimpinan, penegakan integritas, struktur organisasi, kebijakan SDM, serta budaya pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Penilaian Risiko
Mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- c. Kegiatan Pengendalian
Mengukur efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan.
- d. Informasi dan Komunikasi
Mengukur kualitas penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern
Mengukur keberlanjutan evaluasi dan perbaikan atas sistem pengendalian intern.

Melalui SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu mengelola risiko dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

4. Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

Indikator ini menggambarkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah sebagai dasar dalam menentukan prioritas pengawasan.

Inspektorat Daerah Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui:

- a. Identifikasi risiko strategis perangkat daerah;
- b. penyusunan register risiko;
- c. mitigasi risiko;
- d. pemantauan tindak pengendalian risiko;
- e. pemanfaatan hasil penilaian risiko dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

5. Meningkatnya Integritas dan Pencegahan Korupsi.

Indikator ini menunjukkan kontribusi Inspektorat Daerah dalam membangun pemerintahan yang bersih melalui penguatan sistem pencegahan korupsi. Upaya yang akan dilakukan meliputi:

- a. pengawasan terhadap area rawan penyimpangan;
- b. evaluasi pengendalian gratifikasi;
- c. penguatan zona integritas;
- d. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. peningkatan kesadaran aparatur terhadap nilai integritas.

Dengan ditetapkannya IKU Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027, diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dapat terukur secara jelas serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

IKU tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah sekaligus menjadi instrumen pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dalam mendukung terwujudnya Pemerintah Kota Batam yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Batam

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Target Akhir 2029
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	Level 2 (2,643)	Level 3 (3,323)	Level 3 (3,352)
2	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 2 (2,370)	Level 3 (3,100)	Level 3 (3,200)
3	Indeks Manajemen Risiko	Nilai	2,498	3,324	3,247
4	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,748	3,158	3,165
5	Indeks Kepuasan Masyarakat di Inspektorat	Nilai	91,58	91,97	91,97

5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kota Batam

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027
		Nihil		

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam pada Tahun 2027 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

6.1 Catatan Penting

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 –2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025 – 2029.

Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 terdiri atas 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 32 (tiga puluh dua). Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2027, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2027.

6.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 –2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2027 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Batam).
2. Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Inspektorat Daerah Tahun 2027 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2027 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam, maka seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2027.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2027 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dalam pelayanan pengawasan urusan pemerintahan

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD